Globethics Repository



Pemetaan Problem Relasi antar Umat Beragama di Kecamatan Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Journal volume
Authors	Ghofur, Abd
Publisher	UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-03 21:19:44
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/225714

Pemetaan Problem Relasi Antar Umat Beragama di Kecamatan Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir

Oleh: Abd. Ghofur[1]

Abstract

The Problem oof Mapping Relations Between Religious Coomunities in Rimba Subdistrict Rokan Hilir

The Harmony among religious believers is an important pillar for the realization of the harmony of the nation. Religious harmony is not static, but is dynamic as the dynamics in the religious life. Religious harmony fluctuations due to various factors, whether political, economic, social and cultural. Factors of non-religious often have broad impact, sometimes affecting religious factors, such as religious broadcasting, the establishment of houses of worship, religious splinter, inter-religious marriages, religious education, celebration of religious holidays, and others. This article tries to examine the problem of mapping relations between religious communities in the subdistrict Rimba Rokan Hilir.
Keywords*: harmony, religious, and houses of worship*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki kemajemukan agama, budaya, tradisi, suku, dan lainnya. Hal yang perlu dijaga adalah kemajemukan itu menjadi modal besar bagi membangun bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerukunan antarumat beragama merupakan pilar penting bagi terwujudnya keharmonisan bangsa. Kerukunan umat beragama bukan bersifat statis, tetapi bersifat dinamis seiring terjadinya dinamika dalam kehidupan umat beragama. Fluktuasi keharmonisan umat beragama disebabkan berbagai faktor, baik politik, ekonomi, sosial budaya. Faktor-faktor non-keagamaan ini sering berdampak luas, kadangkala mempengaruhi faktor-faktor keagamaan seperti penyiaran agama, pendirian rumah ibadah, sempalan agama, perkawinan antar pemeluk agama, pendidikan agama, perayaan hari besar agama, dan lainnya.

Agama mampu memberi makna bagi kehidupan individu maupun kelompok. Karena agama merupakan faktor esensial bagi identitas seorang individu dan dapat pula menghasilkan solidaritas dari kelompoknya. Apabila diamati secara cermat terdapat hubungan yang kuat antara manusia dan agama. Karena itu wajar sebagai konsekuensinya ada ungkapan bahwa manusia disebut dengan *homo religius*. Menurut pakar Sosiologi Agama, Mircela Eliade, *homo religius* merupakan tipologi manusia yang hidup dalam suatu alam yang sakral, penuh dengan nilai-nilai religius. Penghayatan manusia akan agama bisa mempengaruhi corak serta cara hidupnya (Sastraprateja, 1992: 38).

Dalam membahas tentang kehidupan sosial-keagamaan sebuah masyarakat, tentu tidak bisa lepas dari kelompok-kelompok sosial yang terdapat di dalamnya. Menurut Joachim Wach (1990: 185), wujud dari ekspresi pengalaman keagamaan yang bercorak tindakan akan terlihat pada kelompok pemeluk agama. Seorang pemeluk akan kembali kepada agamanya, seperti menjadi Muslim, Kristen, dan seterusnya. Sebagai tempat acuan semula (*frame of reference*) atau tempat kembali seseorang biasanya disebut *in-group*, dan kelompok yang menjadi tempat kembalinya orang lain disebut *out-group*. Pengelompokan dalam kategori *in-group* dan *out-group* menjadi penting, karena hal ini akan berakibat terhadap perilaku para anggotanya. Anggota dalam suatu kelompok *in-group* biasanya mengembangkan *sentimen* tertentu. Dengan demikian, sikap seorang anggota akan dipengaruhi oleh sentimen tertentu dari keterlibatannya dalam suatu kelompok (Horton, 1992: 259). Stereotip adalah gambaran bersama suatu kelompok terhadap kelompok lain. Stereotip ini bisa bersifat *positif* seperti bersahabat dan ramah, atau *negatif* seperti benci. Meski demikian, stereotip umumnya cenderung negatif. Karakteristik seorang anggota ditimpakan kepada semua anggota kelompok itu. Stereotip kadang dipertahankan menjadi *collective perception* (persepsi bersama) bagi kelompok lain.

Demikian pula dalam relasi antar umat beragama, prasangka menjadi salah satu pemicu munculnya perselisihan, karena prasangka adalah suatu penilaian atau pendapat yang diungkapkan seseorang terhadap orang lain sebelum mengetahui semua fakta yang sebenarnya. Munculnya prasangka dalam diri seseorang tidak hanya disebabkan oleh ketidakmatangan psikologis, tetapi juga karena proses sosialisasi atas sikap prasangka yang dikembangkan kelompok tertentu. Prasangka memunculkan kecenderungan untuk menjauhi orang lain dengan mengambil jarak dan tidak berhubungan erat (Gerungan 2004: 164).

Ada lima hal yang mendasari munculnya prasangka: *pertama*, etnosentrisme, yaitu kecenderungan untuk mengatakan baik pada kelompoknya dan berpikir buruk terhadap kelompok lain; *kedua*, fakta yang sederhana, yaitu memberikan penilaian tentang orang lain dengan pengetahuan yang tidak memadai; *ketiga*, membuat generalisasi mengenai individu-individu dari kelompok lain dari pengalamannya sendiri; *keempat*, adanya kecenderungan untuk menyeleksi stereotip tertentu yang mendukung keyakinannya sendiri berkaitan dengan kelompok lain; dan *kelima*, adanya kecenderungan untuk mengembangkan prasangka terhadap orang-orang yang bersaing dengan dirinya (Horton, 1992: 356). Relasi antarumat bergama sering menimbulkan persoalan yang diakibatkan karena terjadinya kesalahan dalam mempersepsi. Persepsi negatif itu bisa muncul diakibatkan oleh adanya setereotip, saling curiga, saling tidak percaya dan pada gilirannya berujung pada konflik terselubung, atau terbuka. Hal ini telah menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap nilai keharmonisan, keselarasan yang selama ini terbina dengan baik dalam masyarakat yang multi agama.

Berdasarkan studi pendahuluan (*preliminary study*) di lokasi penelitian, ada beberapa aspek menarik untuk diteliti seperti masyarakat di sebagian desa-desa Kecamatan Rimba melintang terdapat unsur-unsur prasangka negatif, dan persepsi negatif antara pemeluk Islam dan Kristen. Keragaman pemeluk agama di wilayah ini muncul isu penyebaran agama kepada pemeluk lain dengan istilah "kristenisasi" dan "islamisasi". Terdapat pula kasus pembongkaran gereja dan penertiban gereja serta masalah sosial ekonomi, seperti pembakaran tempat maksiat dan konflik perebutan lahan. Dalam berinteraksi sebagian dari kedua pemeluk agama tersebut memiliki sikap dan perilaku tertutup serta curiga. Dalam kehidupan keseharian terdapat kesenjangan dan pengambilan jarak dalam pergaulan antara kedua pemeluk agama. Persoalan dalam relasi antarumat beragama, Islam dan Kristen di wilayah ini, perlu pemetaan yang baik agar memudahkan dalam menuntaskan persoalan yang muncul.

Relasi antar Umat Beragama

Pakar Sosiologi Agama, Joachim Wach (1990: 216) berpendapat bahwa pengalaman dan penghayatan manusia akan yang suci diekspresikan dalam tiga bentuk, yang disebutnya sebagai pengalaman keagamaan, yaitu: *pertama*, ekspresi pengalaman keagamaan dalam bentuk pemikiran; *kedua*, ekspresi pengalaman keagamaan dalam bentuk tindakan; dan *ketiga*, ekspresi pengalaman keagamaan dalam bentuk persekutuan. Pengalaman keagamaan dalam definisi Wach adalah tanggapan manusia terhadap sesuatu yang dihayati sebagai realitas mutlak (*ultimate reality*) atau Tuhan. Dengan demikian, pengalaman keagamaan baginya adalah aspek batiniah dari saling hubungan antara manusia dan pikirannya dengan Tuhan. Pemikiran manusia tentang Tuhan kemudian berlanjut dalam ekspresi yang berbentuk tindakan. Koentjaraningrat (1997: 257) menyebut ikatan antara pemeluk agama dengan *religious community* atau kelompok keagamaan. Ekspresi intelektual memiliki sumbangan kuat terhadap berkembangnya perilaku seorang.

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Smith (1995: 223) bahwa ada tiga hal pokok dalam agama yang secara psikologis menentukan pembentukan sikap dan perilaku pemeluknya, yaitu: *pertama*, otoritas *dogmatis*, atau kebenaran yang bersifat mutlak; *kedua*, otoritas *terarah*, atau ketuntasan pengaturan; dan *ketiga*, *perlembagaan otoritas*, atau integrasi pemahaman kebenaran mutlak dalam perumusan struktur keagamaan.

Persepsi antar Pemeluk Agama

Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pokok pembahasan dalam berkomunikasi antara kelompok sosial dan budaya, sedangkan penafsirannya adalah inti dari persepsi (Dedi Mulyana, 2000: 167). Menurut Verderber, persepsi adalah proses yang dilakukan panca indra manusia dalam memberikan makna tentang suatu objek; persepsi juga merupakan hasil seleksi, pengorganisasian dan interpretasi di panca indra manusia. Dalam kaitan

itu, ada beberapa aspek penting dalam mempersepsi, di antaranya: *pertama*, apabila yang menjadi objek persepsi adalah manusia, bukan benda digunakan istilah persepsi interpersonal. *Kedua*, apabila yang menjadi objek itu adalah benda digunakan istilah persepsi objek. Melihat pentingnya persepsi ini, maka dapat dikatakan bahwa setiap anggota kebudayaan yang berbeda akan melihat dunia ini secara berbeda. Perbedaan setiap orang dalam mempersepsi, karena beberapa faktor seperti indra, pengalaman, budaya, dan suasana psikologis yang berbeda pada suatu objek.

Persepsi tentang diri dan orang lain berpengaruh ketika seseorang mempersepsi orang atau objek dari budaya lain. Dedi Mulyana menjelaskan bahwa persepsi itu sangat terikat oleh budaya (*culture bound*). Ketika seseorang memaknai suatu pesan, maka akan bergantung pada sistem nilai yang dianut kelompok tersebut. Kecenderungan untuk menjadi etnosentrisme akan mengakibatkan seseorang menilai kelompok lain menurut berbagai kategori dan nilai budayanya sendiri. Nilai-nilai sosial-budaya biasanya berasal dari isu yang menjadi bagian dari miliu budaya. Nilai normatif ini menjadi rujukan seseorang anggota budaya atau agama tentang baik dan buruk, salah dan benar. Nilai budaya tersebut ikut serta menentukan bagaimana orang mempersepsi sistem yang berada di luar dirinya. Dari persepsi itu muncul cara belajar untuk merespon suatu objek secara konsisten (Stokof & Jamal, 2003: 28).

Persepsi dalam hubungan antar umat beragama merupakan masalah utama yang sering menimbulkan kesulitan, karena kesalahan dalam persepsi sosial disebabkan oleh perbedaan-perbedaan budaya yang mempengaruhi persepsi. Pemberian makna kepada pesan dalam banyak hal dipengaruhi oleh budaya yang memberi persepsi (Samover & Porter, 1982: 28). Akhirnya dapat ditegaskan bahwa unsur-unsur kebudayaan itu mudah diamati dan diidentifikasi pada saat memasuki lingkungan kebudayaan. Faktor persepsi pemeluk suatu agama yang menanggapi hubungan dengan para pemeluk agama lain penting untuk diketahui. Persepsi manusia bisa disebut statis bisa pula dinamis. Disebut statis manakala persepsi terhadap suatu agama atau kelompok keagamaan itu relatif tidak berubah (*persepsi laten*).

Prasangka itu ada beberapa macam, di antaranya adalah prasangka budaya, sosial dan keagamaan. Prasangka bisa muncul akibat dari sikap antipati berdasarkan generalisasi yang salah dan kaku. Prasangka mungkin dirasakan atau dinyatakan. Prasangka bisa diarahkan kepada suatu kelompok secara keseluruhan, atau seseorang karena ia anggota tersebut. Jika kita berprasangka, maka kita melakukan penilaian terhadap sekelompok orang berdasaarkan stereotip yang dibangun sebelum kita mengetahui sebenarnya tentang mereka (Dedi Mulyana, 2000: 223). Peluang terjadi persepsi yang subjektif bisa menimbulkan konflik antar kepentingan.

Penggunaan pendekatan dialog budaya (*cultural dialogue*) dalam penelitian tentang budaya suatu kelompok atau etnik dilakukan dengan penelitian yang menekankan pada masalah hubungan antar agama, etnik, atau golongan. Kritik budaya (*cultural critics*) yang lebih menekankan pada pengelompokan hambatan hubungan antarbudaya atau etnik; pengkajian terhadap sejauhmana jenis-jenis, intensitas suatu faktor penghambat memberikan rekomendasi yang bersifat aplikatif sehingga dapat dijadikan pedoman dalam hubungan antarbudaya. Ada prasyarat yang mesti ditelaah dalam membangun komunikasi antarbudaya atau agama secara efektif, yaitu: *pertama*, menghormati anggota budaya sebagai manusia; *kedua*, menghormati budaya atau agama lain apa adanya bukan sebagaimana yang dikehendaki; *ketiga*, menghormati hak anggota budaya lain untuk bertindak berbeda dari cara kita; *keempat*, pelaku lintas budaya harus belajar hidup bersama dengan orang lain (Dedi Mulyana, 2000: 6).

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan eprilaku yang diamati (L.J. Moelong, 2000: 3). Penelitian ini sifatnya studi kasus, yaitu penelitian empiris yang menguraikan fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, dengan menggunakan sumber observasi, wawancara, dan dokumen. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian, berupaya untuk memahami gejala-gejala, dan tidak memerlukan kuantifikasi. Metode kualitatif merujuk kepada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni apa yang dituturkan orang, baik lisan maupun tulisan.

Langkah-langkah penelitian ini dapat tergambar-kan lewat 14 karakteristik pendekatan kualitatif

seperti yang dijelaskan Lincoln dan Guba (Haidar Alwasliyah, 2002: 104) sebagai berikut ini: (1) Latar ilmiah, (2) Manusia sebagai instrument, (3) Penggunaan pengetahuan yang tidak eksplisit, (4) Metode-metode kualitatif, (5) Sampel purposif, (6) Analisis data induktif, (7) Teori berdasarkan data di lapangan, (8) Desain penelitian mencuat secara alamiah, (9) Hasil penelitian berdasarkan negosiasi, (10) Cara pelaporan studi kasus, (11) Interpretasi kontekstual, (12) Aplikasi temuan tentatif, (13) Batasan ditentukan fokus, dan (14) Keterpercayaan dengan kriteria khusus. Melalui karekteristik tersebut, diupayakan mampu mengamati problem relasi antar pemeluk agama.

Sasaran dan Sumber Data

Sasaran penelitian ini adalah pemeluk agama Islam dan Kristen di enam dari 12 desa/kelurahan Kecamatan Rimba Melintang, yaitu Kelurahan Rimba Melintang dan 5 Desa, yaitu Desa Pematang Botam, Seremban Jaya, Jumrah, Mukti Jaya, dan Harapan Jaya. Fokus penelitiannya adalah pemetaan problem relasi antarumat Bergama.

Sumber data adalah masyarakat pemeluk Islam dan Kristen di Kecamatan Rimba Melintang. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dari informan. Informan dipilih secara purposif dengan model *snow ball*. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan pangkal dan informan kunci (*key informan*). Menurut Koentjaraningrat (1992: 130) informan pokok adalah orang yang dipandang mampu memberikan informasi secara baik dan menunjuk orang lain sebagai informan pangkal yang dapat memberikan informasi lebih mendalam. Para informan pangkal penelitian adalah orang yang memiliki posisi, pengetahuan, dan pengalaman khusus di antaranya Camat, aparat pemerintah. Sedangkan informan kunci dalam penelitian ini adalah Tokoh Islam dan tokoh Kristen yang mengetahui persoalan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai instrumen. Peran peneliti menentukan dalam setiap proses penjaringan data. Ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen mencakup segi responsif, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan atas pengetahuan, memproses data secepatnya dan sebaik mungkin. (L.J. Moelong, 2000: 121). Data dalam penelitian dikumpulkan berdasarkan pengelompokan data primer dan sekunder. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka pengumpulan data digunakan adalah melakukan wawancara, observasi, dan dokumen.

Observasi berperan-serta (*participant observation*) dilakukan sambil sedikit banyak berperan-serta dalam kehidupan orang yang diteliti. Menurut Denzin (1978) pengamatan berperan serta adalah strategi lapangan secara simultan memadukan analisis dokumen, wawancara responden dan informan dan obeservasi langsung (Dedi Mulyadi, 2002: 162). Wawancara mendalam (*in-depth intervew*) dilakukan, baik secara terstruktur maupun tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur mirip dengan percakapan informal. Wawancara ini dilakukan dapat bersifat luwes, susunan pertanyaan atau kata-kata dapat diubah saat wawancara. Wawancara dalam penelitian kualitatif begitu penting, menurut Lincoln dan Ghuba (Haidar Alwasliyah, 2002: 112) antara lain bertujuan untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, tuntunan, kepedulian dan lain-lain. Wawancara juga digunakan untuk memverifikasi, khususnya menentukan keabsahan data observasi.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis melalui model Mathew dan Huberman. Analisis data secara sistematis catatan observasi, wawancara, dan dokumentasi (Miles & Huberman, 1992: 68). Berikut ini tahapanya:

a. Kategorisasi dan mereduksi, yaitu melakukan pengumpulan informasi terkait dengan masalah penelitian. Data dikelompokkan sesuai topik permasalahan.

b. Data yang telah dikelompokkan disusun dalam bentuk narasi-narasi.

c. Melakukan interpretasi data, apa yang telah diberikan informan.

d. Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun.

Hasil dan Analisis

Geografi dan Luas Wilayah

Kecamatan Rimba Melintang merupakan salah satu dari 13 kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, yaitu Kecamatan Ujung Batu; Rokan Koto IV; Rambah; Tambusai; Kepenuhan;

Kunto Darussalam; Rambah Samo; Rambah Hilir; Tambusai Utara; Bangun Purba; Kabun dan Tandun. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari beberapa sungai dan pulau. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar yang melintas sejauh 350 km dari muaranya di Rokan Hilir.

Kecamatan Rimba Melintang luas wilayahnya yaitu 235.48 Ha. Kecamatan ini berbatasan langsung di Sebelah Utara dengan Kecamatan Bukit Kapur; Sebelah Selatan dengan Kecamatan Tanah Putih; Sebelah Barat dengan Kecamatan Bangko, dan Sebelah Timur dengan Kecamatan Tanah Putih. Kecamatan ini menaungi satu Kelurahan, yaitu Rimba Melintang, dan 11 Desa,yaitu Desa Jumrah, Karya Mukti, Lenggadai Hilir, Lenggadai Hulu, Mukti Jaya, Teluk Pulau Hilir, Teluk Pulau Hulu, Seremban Jaya, Harapan Jaya, Pematang Botam, dan Desa Pematang Sikek. Jarak dari Kecamatan Rimba Melintang ke Kota Kabupaten sekitar 60 KM, sedangkan Jarak dari Kabupaten ke Kota Provinsi Riau sekitar 231 KM.

Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Rimba Melintang pada tahun 2013 berjumlah 34.711 orang (8.642 KK). Di Kelurahan Rimba Melintang, dan 11 Desa yang berada di lingkungan kecamatan tersebar penduduk dari berbagai macam Etnik baik suku Melayu, Jawa; suku Batak Karo, Batak Mandailing; Cina dan lainnya.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jum-lah
1	Kelurahan Rimba Melintang	3462	3332	6794
2	Desa Karya Mukti	1307	1226	2533
3	Desa Jumrah	1759	1738	3497
4	Desa Mukti Jaya;	1755	1619	3374
5	Desa Teluk Pulau Hulu;	1812	1732	3544
6	Desa Teluk Pulau Hilir	892	874	1766
7	Desa Lenggadai Hulu	1868	1909	3777
8	Desa Lenggadai Hilir	814	770	1584
9	Desa Seremban Jaya	1259	1213	2472
10	Desa Pematang Botam	980	873	1853
11	Desa Harapan Jaya	494	520	1014
12	Desa Pematang Sikek	1251	1252	2503
	Jumlah	17.653	17.058	34.711

Sumber: BPS Kecamatan Rimba Melintang Desember 2012

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa penyebaran penduduk di Kecamatan Rimba Melintang tidak merata di masing-masing desa dan kelurahan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kepadatan penduduk tetap didominasi di wilayah kota kecamatan, di samping jumlah penduduk yang besar berkaitan dengan luas wilayah yang didiami. Kelurahan Rimba Melintang merupakan wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi dibandingkan dengan desa-desa yang ada, mengingat wilayah ini adalah ibu kota Kecamatan.

Jika dibandingkan kondisi demografi Kecamatan Rimba Melintang dengan kecamatan lain di Kabupaten Rokan Hilir. Dapat dilihat pada data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten pada akhir Tahun 2012, di mana jumlah penduduk Kabupaten adalah sebanyak **784.951** jiwa. Hal itu meliputi Penduduk Kecamatan Bagan Sinembah menempati urutan tertinggi, yaitu 173.093 jiwa, sedangkan Kecamatan Rantau Kopar jumlah terendah, yaitu 7.505 jiwa.

Aspek Sejarah

Menurut informan, kata Rimba Melintang artinya adalah banyaknya kayu hutan yang melintang pada saat itu, tepatnya pada tahun 1889 kampung ini dimasuki oleh Muhamad Saleh. Ia sebagai orang yang pertama menyebutkan wilayah ini sebagai wilayah terbanyak kayu hutan yang bergelimpangan di bakal badan jalan. Muhamad Saleh yang baru pertama kali datang, merasakan banyak sekali batang kayu hutan yang masih berserakan di sana, padahal wilayah itu sudah dihuni. Hingga akhirnya Muhammad Saleh berinisiatif menamakan kampung itu dengan sebutan Kampung Rimbo Melintang sejak tahun 1904 M, hingga dikenallah nama tersebut hingga sekarang (Wawancara, Mungki Pamungkas, 5 Okt 2013).

Sedangkan sejarah terbentuknya Kabupaten Rokan Hilir, perlu ditelaah zaman Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko, dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih, pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1880 M. Setelah Bagansiapiapi dibuka oleh pemukim Cina berkembang, maka Belanda memindahkan Pemerintahan *Controleur*-nya ke Kota Bagansiapiapi pada tahun 1901M. Bagansiapiapi makin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern di kota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Berdasarkan *Staatsblad 1894 No.94*, *onderafdeeling*, Bagansiapiapi masuk

dalam *afdeeling* Bengkalis, *Residentie Ooskust van Sumatra* terdiri dari tiga subdistrik yakni Bangko, Kubu, dan Tanah Putih (Lucas Partanda, 2011: 33).

Ketika Indonesia diproklamirkan, wilayah kewedanaan Bagansiapiapi yang meliputi Kubu, Bangko, dan Tanah Putih, digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis. Wilayah Kewedanaan Bagansiapiapi, terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Kubu dan Kecamatan Bangko ditambah Kecamatan Rimba Melintang, dan Bagan Sinembah, yang kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan sebagai kabupaten baru di Provinsi Riau sesuai dengan UU RI Nomor 53 tahun 1999, sedangkan Bagansiapiapi ditetapkan sebagai ibu kota sementara (Portal Nasional: 22 Agust 2013). Namun, karena infrastruktur di Ujung Tanjung masih berupa desa di Kecamatan Tanah Putih belum memungkinkan untuk dijadikan sebagai sebuah ibu kota kabupaten, akhirnya Bagansiapiapi, dengan infrastruktur kota yang lebih baik, pada tanggal 24 Juni 2008 resmi ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir yang sah setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui 12 Rancangan Undang-undang (RUU) Pembentukan Kabupaten/Kota dan RUU atas perubahan ketiga atas UU Nomor 53 Tahun 1999 disahkan sebagai Undang-undang dalam Rapat Paripurna.

Pendidikan

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik Kecamatan Rimba Melintang akhir tahun 2012, dipaparkan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat Sekolah Dasar	17230
2	Tamat Sekolah Dasar/MI	6560
3	Tamat SLTP/MTs	4419
4	Tamat SMU/MA/SMK	5751
5	Tamat DI/D2/D3	264
6	Tamat Perguruan Tinggi D4/SI/S2/S3	182
7	Buta Huruf	-
	Jumlah Total	34.711

Sumber: BPS Kecamatan Rimba Melintang Desember 2012

Kesadaran pentingnya pendidikan bagi masyarakat Kecamatan Rimba Melintang dikatakan masih rendah. Hal ini tampak bahwa perbandingan antara yang tidak tamat Sekolah Dasar, kelompok anak balita dibandingkan dengan anak yang telah mampu menyelesaikan Sekolah Dasar, SLTP, SLTA sederajat dan Perguruan Tinggi masih sangat jauh lebih besar yang tidak berijazah SD atau tidak tamat SD. Hal ini karena fasilitas lembaga pendidikan di wilayah ini masih terbatas, di samping jarak sekolah yang jauh dengan sebagian rumah penduduk, terutama sekolah SLTP dan SLTA sederajat.

Berikut ini tabel sarana dan prasarana Pendidikan di Kecamatan Rimba Melintang.

Tabel 3. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tingkat TK	16 buah
2	PAUD	17 Buah
3	Tingkat SD Negeri	19 Buah
4	SD Swasta	5 buah
5	SMP Negeri	3 buah
6	SMP Swasta	3 Buah
7	SLTA Negeri	2 buah
8	SLTA Swasta	5 Buah

Sumber: BPS Kecamatan Rimba Melintang Desember 2012

Dari tabel di atas diketahui sarana pendidikan yang mencukupi kebutuhan masyarakat adalah fasilitas pendidikan TK sebanyak 16 buah, PAUD sebanyak 17 buah. SDN sebanyak 19 buah. Sekolah jenjang tersebut sudah merata tersebarr di penjuru desa-desa di Kecamatan Rimba Melintang. Kesadaran masyarakat mendirikan MI (Madrasah Ibtidaiyah) 3 buah; SD Swasta 2 buah, yaitu SD Metodhis di Pematang Botam dan Sekolah Swasta dikelola oleh ormas Islam.

Sekolah SLTPN baru tiga buah untuk kebutuhan 12 desa di Kecamaan Rimba Melintang, yaitu terletak di Desa Lenggadai Hulu, Teluk Pulau Hulu, dan Desa Jumrah. Sekolah SMAN yang dibangun Pemerintah dua buah, yaitu SMAN 1 di Kelurahan Rimba Melintang dan kedua SMAN 2 di Desa Lenggadai Hulu. Sekolah swasta jenjang SLTP, yaitu SMP Al-Muhsinin; MTs Hubbul Wathan di Rimba Melintang; MTs Nurul Bilad di Teluk Pulau Hulu. Sekolah SLTA swasta adalah MAS Yahusada di Lenggadai Hulu; MAS Al-Mukhsinin di Kelurahan Rimba Melintang; SMA Swasta Rokan di Desa Teluk Pula Hulu dan sekolah SMK SPMA di Desa Teluk Pulau Hilir dan SMK Tunas Bangsa di Desa Seremban Jaya. Jenjang Perguruan Tinggi di Kota Kabupaten, yaitu Kelas Jauh FKIP Universitas Riau dan STAI Ar-Ridha dan yang baru didirikan adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Sosial Ekonomi

Kehidupan masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang mayoritas bertumpu pada bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini mengingat kebanyakan penduduk berdomisili di desa-desa dan terhamparnya lahan hutan, pertanian dan perkebunan yang tersedia. Bidang pertanian dan perkebunan sendiri menempati posisi tertinggi yang digeluti penduduk. Berikut ini tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan.

Tabel 4. Jumlah Prosentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Mata Pencarian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah orang
1	Pertanian	8.252
2	Perkebunan	4.347
3	Nelayan	215
4	Peternakan	83
5	Perdagangan dan Jasa	433
6	Buruh Bangunan	292
7	Pengangkutan barang	98
8	PNS	153
9	TNI/Polri	6
10	Pensiunan TNI/Polri	12
	TOTAL	13.891

Sumber: BPS Kecamatan Rimba Melintang Desember 2012

Pengembangan di bidang perekonomian di Kecamatan Rimba Melintang diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan, yaitu beras, palawija, dan holtikultura. Peningkatan produksi perkebunan sawit, karet dan kelapa terus digalakkan seperti diprogramkan pemerintah. Karena 50% lebih perekonomian bertumpu dari sektor pertanian dan perkebunan. Sektor itu dijadikan prioritas dalam pembangunan ekonomi rakyat.

Sosial Keagamaan

Penduduk Kecamatan Rimba Melintang memeluk beragam agama. Agama yang dianut penduduk setempat mayoritas beragama Islam dari etnik Melayu, Jawa, Batak Tapanuli Selatan, dan Minang berjumlah sekitar 88%. Selanjutnya sebagian memeluk agama Kristen sebesar 7% dan Katholik sebesar 4%. Umumnya kedua agama ini dianut oleh masyarakat Batak Karo Tapanuli Utara. Agama Konghucu, Hindu, dan Budha relatif sedikit dianut oleh etnik Cina 1% (Data BPS Kecamatan,15 Sept 2013).

Berkaitan jumlah sarana ibadah, di Kecamatan Rimba Melintang karena mayoritas pemeluk Islam, sarana masjid berjumlah 40 buah dan 82 mushalla. Sarana ibadah pemeluk muslim tersebut menyebar di seluruh wilayah desa dan kelurahan di Kecamatan Rimba Melintang. Sarana ibadah lain yang cukup banyak adalah gereja dengan prosentase jumlah penduduknya sekitar 11%, terdiri dari Kristen 7% dan Katolik sebesar 4%. Jumlah Gereja tercatat di BPS Kecamatan berjumlah 10 Buah. Tetapi setelah dicek di monografi desa atau kelurahan ternyata jumlahnya lebih banyak, yaitu 23 Buah. Berikut tabel sarana ibadah di lokasi penelitian.

T**abel 5.** Jumlah Sarana Ibadah di Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Mas-jid	Surau/ Mushalla	Data Gereja Kec./Desa
1	Kelurahan Rimba Melintang	5	11	4<>6
2	Desa Karya Mukti	3	9	-
3	Desa Jumrah	4	8	1<>4
4	Desa Mukti Jaya;	4	5	2<>3
5	Desa Teluk Pulau Hulu;	3	5	-
6	Desa Teluk Pulau Hilir	4	7	-
7	Desa Lenggadai Hulu	3	8	-
8	Desa Lenggadai Hilir	2	8	-
9	Desa Seremban Jaya	3	5	1<>3
10	Desa Pematang Botam	3	7	1<>5
11	Desa Harapan Jaya	4	6	1<>2
12	Desa Pematang Sikek	3	8	-
	Jumlah	41	87	10<>23

Sumber: BPS Kecamatan Rimba Melintang Desember 2012 dan monografi Desa

Masjid di desa dan kelurahan di Kecamatan Rimba Melintang sesuai dengan jumlah rasio penduduk yang ada, dan pemeluk muslim merupakan mayoritas. Sedangkan letak gereja, baik Kristen maupun Katolik berada di 5 Desa dan 1 kelurahan. Hal ini mengingat komunitas etnik Batak asal Tapanuli Utara terkonsentrasi di wilayah tersebut. Gereja berdiri dengan beragam *aliran ritus dan liturgi* yang dimiliki masing-masing pemeluk Kristen dan Katolik menyebabkan pemeluknya tidak bisa melakukan kebaktian di gereja yang sama. Aliran-aliran Gereja yang berkembang di wilayah ini antara lain: Gereja Pantekosta; Gereja Bethel dan Gereja Katolik; HKBP (Huria Kristen Batak Protestan); GPdI dan GBKP (Gereja Batak Karo Protestan).

Karena itulah berdiri gereja besar dan gereja kecil semi permanen melalui pemanfaatkan rumah penduduk untuk kegiatan keagamaan yang berfungsi seperti gereja. Ketika pemeluk Kristen dan Katolik ini berusaha untuk melakukan pelebaran gereja jadi permanen, muncul konflik dengan penduduk setempat, khususnya dengan masyarakat muslim. Faktor timbulnya konflik karena kelompok muslim

(85%) di wilayah itu menilai tidak pantas didirikan gereja yang sifatnya permanen karena jumlah pemeluk kristen atau katolik relatif sedikit, dan di desa itu sudah berdiri beberapa gereja. Apalagi kalau merujuk pada PBM (Peraturan Bersama Menteri) antara menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no. 8 dan 9 tahun 2006 terdapat beberapa syarat yang tidak bisa dipenuhinya.

Bila dilihat dari substansi pendirian rumah ibadah dan prasyarat yang diatur oleh PBM 2006 tersebut ternyata tidak mampu dipenuhi. Namun, aparat desa masih memberi toleransi hadirnya gereja semi permanen, yaitu bila bangunan rumah yang difungsikan sebagai tempat ibadah dan kebaktian tidak akan dipermanenkan dan diperlebar. Artinya, sepanjang masih berbentuk seperti rumah dan berfungsi sebagai rumah temoat tinggal walaupun dijadikan tempat kebaktian atau aktivitas kerohanian tetap diberi kebebasan, mengingat ada perbedaan aliran dengan gereja yang telah berdiri lebih dulu. Tetapi beberapa tahun kemudian, justru gereja yang semi permanen yang semula sebagai rumah tempat tinggal tersebut diperlebar dan dipermanenkan. Akibatnya muncul penolakan warga, dan tuntutan warga muslim agar mengembalikan fungsi awal sebagai tempat tinggal atau dirobohkan. Karena proses pelebaran dan perluasan bangunan gereja tanpa izin dari pihak terkait, akhirnya munculah pembongkaran gereja di beberapa wilayah, yaitu di Desa Mukti Jaya tahun 2009; Desa Jumrah tahun 2010; dan Desa seremban Jaya 2011. (Wawancara, Erma Yulis & Sugeng, 15 Sept 2013).

Sosial Budaya

Sistem sosial budaya yang berkembang di Kecamatan Rimba Melintang tidak jauh berbeda dengan yang berkembang di wilayah lain di Provinsi Riau umumnya. Dari sisi ragam etnik dan budaya masyarakat, terdapat beberapa desa atau kelurahan yang tingkat pembauran antaretnik dan agama sangat beragam, yaitu 1 Kelurahan dan 5 Desa, terutama antaretnik Melayu, Jawa, Batak Muslim, Batak Karo, dan etnik Cina. Keenam desa/kelurahan tersebut adalah Kelurahan Rimba Melintang, Seremban Jaya, Mukti Jaya, Pematang Botam, Jumrah. dan Harapan Jaya.

Heterogenitas agama, etnik, dan budaya bisa menimbulkan persoalan tersendiri di lingkungan masyarakat. Kadang kala persoalan itu menimbulkan konflik terselubung (*laten*) karena adanya persaingan dalam mencari pemenuhan kebutuhan hidup, ekspresi budaya, dan agama. Pernah muncul peristiwa yang menimbulkan konflik tentang penertiban warung atau kedai *tuak* di Desa Seremban Jaya dan Jumrah tahun 2009-2013. Kedai *tuak* banyak berdiri di wilayah dekat pemukiman penduduk Kristen dan Katolik. Tempat-tempat tersebut juga dijadikan sebagai tempat berkumpulnya kalangan pemuda-pemuda Muslim dan Kristen. Mereka sama-sama minum *tuak* dan menghabiskan waktu sambil bermain domino. Peristiwa penertiban dan pelarangan buka kedai *tuak* yang dilakukan oleh aparat desa dipicu ketika kedai-kedai tersebut tetap dibuka pada siang dan malam saat bulan Ramadan. Akhirnya dilakukan penertiban oleh aparat desa dan mendapat dukungan dari pihak Kecamatan dan Polisi dengan mengeluarkan surat edaran tentang penertiban kedai tuak tersebut. (Wawancara, Sukardi, 3 Okt 2013).

Persoalan lain adalah pembakaran tempat maksiat (prostitusi) di Desa Pematang Botam, dekat areal pengeboran Minyak PT. Cevron Pacifik Indonesia (CPI) atau lebih dikenal dengan *areal tangki*. Di sekitar areal tangki inilah dibangun pondok-pondok semi permanen yang awalnya sebagai tempat berdagang sekaligus menjual makanan ringan, *tuak*, dll. Lambat-laun areal ini berkembang menjadi tempat prostitusi, sementara PSK (pekerja seks komersial) didatangkan dari luar. Kejadian pembakaran tempat warung *tuak*, judi dan prostitusi yang dilakukan masyarakat tersebut pada tahun 2011. Namun, saat peneliti turun ke lokasi masih berdiri kembali di areal tangki itu kedai-kedai barang harian termasuk *tuak*, hanya saja menurut Kepala Desa Pematang Botam, mereka yang menghuni kedai-kedai itu tidak berani lagi menjadikan sebagai tempat prostitusi.

Persoalan konflik yang terbaru dan belum ada tanda-tanda penyelesaian adalah masalah perebutan lahan antara masyarakat (penduduk menetap) yang berhadapan dengan Perusahaan pengembangan HTI (Hutan Tanaman Industri), yaitu PT. Gunung Mas Raya dan PT. RUJ. Konflik perebutan lahan ini terjadi di tiga desa, yaitu di Desa Teluk Pulau Hilir, Teluk Pulau Hulu, dan Pematang Sikek. Persoalannya adalah masyarakat mengklaim wilayah itu termasuk kebun garapannya yang telah lama mereka garap dan sebagiannya telah ditanami sawit, dan jenis tanaman lainnya. Sementara dari pihak perusahaan mengklaim itu wilayah garapannya.

Pemetaan Problem Relasi antar umat Beragama

Pertama, Problem Penertiban dan Pembongkaran Gereja

Pada enam desa/kelurahan dari 12 desa/kelurahan di Kecamatan Rimba Melintang warga muslim tercatat sekitar 85% berasal dari etnik Melayu, Jawa, dan Batak Muslim. Kemudian ada sekitar 15% pemeluk Kristen dan Katolik dipeluk oleh etnik Batak Tapanuli Utara. Problem yang mempengaruhi relasi antarumat beragama di Kecamatan Rimba Melintang adalah masalah pendirian rumah ibadah dalam hal ini gereja. Gereja bagi pemeluk Kristen dan Katolik berdasarkan data BPS Kecamatan akhir tahun 2012 berjumlah 10 buah, sementara setelah dicek di monografi di enam desa/kelurahan berjumlah 23 buah. Gereja tersebut terletak di Kelurahan Rimba Melintang, Desa Pematang Botam, Seremban Jaya, Jumrah, Desa Mukti Jaya, dan Harapan Jaya.

Sebanyak 13 dari 23 Gereja yang tidak tercatat di monografi desa memiliki dua fungsi, *pertama* sebagai tempat ibadah atau kebaktian mingguan dan *Partahiangan* (sejenis pengajian berkala). *Kedua,* gereja kecil semi-permanen itu semula berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi pemilik rumah telah merelakan di samping tempat tinggalnya sekaligus sebagai tempat kebaktian, mengingat jauhnya gereja yang sealiran dengan mereka.

Alasan lain tentang pendirian gereja yang tidak prosedural tersebut didasarkan perbedaan *aliran, ritus,* dan *liturgi* yang dimiliki masing-masing gereja, menyebabkan pemeluknya tidak bisa melakukan kebaktian di gereja yang berbeda aliran. Beberapa tahun kemudian timbul persoalan ketika pemeluk Kristen melakukan pelebaran atau perluasan gereja yang permanen, bahkan muncul konflik dengan penduduk setempat (muslim) seperti terjadi pembongkaran gereja di tiga wilayah, yaitu di Desa Mukti Jaya tahun 2009; Desa Jumrah dan seremban Jaya tahun 2010 dan 2011. Pemeluk muslim menilai tidak pantas didirikan gereja, karena pemeluk Kristen amat sedikit. Apalagi kalau merujuk pada PBM (Peraturan Bersama Menteri) antara menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no. 8 dan 9 tahun 2006.

Persyaratan yang mesti dipenuhi oleh Pemeluk Kristen dan Katolik ketika ingin mendirikan Gereja atau memperluas dan mengalihfungsikan rumah tempat tinggal jadi Gereja di antaranya: (1) lampiran daftar nama dan foto copy KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan pejabat setempat; (2) Mendapat dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan pejabat setempat; (3) Mendapat rekomendasi tertulis dari Ka Kemenag Kab/Kota; dan (4) Mendapat rekomendasi tertulis dari FKUB Kab/Kota.

Beberapa peristiwa pembongkaran Gereja yang terjadi di Kecamatan Rimba Melintang.

1. Pembongkaran *Gereja Pantekosta di Indonesia* (GPdI) terletak di Desa Mukti Jaya tahun 2009. Pembongkaran gereja ini dilakukan oleh masyarakat Muslim sebagai akibat dari pemeluk Kristen tidak mengindahkan larangan membangun gereja permanen dari pihak desa, yang semula berfungsi sebagai tempat tinggal bapak Karyono di samping sebagai tempat kebaktian layaknya gereja, khusus bagi 15 Kepala Keluarga (KK). Tetapi gereja GPdI dalam kegiatan kerohanian/*kebaktian* selalu mengundang jemaat dari luar. Karena jemaat yang mengikuti kebaktian bertambah terutama dari luar desa, maka pegurus Gereja menggalang dana dari berbagai pihak untuk memperluas bangunan Gereja jadi permanen. Saat merenovasi pengurus Gereja tidak melapor kepada pihak berwenang atau minta izin, baik pada aparat desa maupun kecamatan. Hal ini yang menyulut kemarahan warga muslim mengingat pemeluk Kristen jumlahnya hanya 15 KK. Kemarahan itu juga perlu diketahui bahwa di desa tersebut sudah berdiri dua buah gereja.

   Pada tahun 2009 masyarakat muslim memerintahkan pemeluk Kkristen merobohkan Gereja yang sudah terlanjur dibangun tersebut, dan mengembalikan fungsi seperti rumah hunian dan sebagai sarana kebaktian kalangan internal desa. Karena tidak diindahkan, akhirnya masyarakat muslim di lingkungan tersebut beramai-ramai mendatangi lokasi dan terjadilah pembongkaran gereja tersebut hingga menimbulkan konflik. Agar tidak terjadi perkelahian massal, setelah terjadinya pembongkaran, aparat desa menghubungi kepolisian setempat. Sementara pihak Polsek setelah mengamati dan terjun di lapangan, waktu bersamaan juga menghubungi pihak Polda Riau, DPRD, dan MUI turun ke lokasi kejadian untuk menjadi mediator penyelesaian konflik. Pendekatan persuasif

dilakukan pihak terkait agar permasalahan tidak berkelanjutan. Saat ini di Desa Mukti Jaya telah berdiri kembali gereja GPdI tetapi tidak merubah bentuk bangunan seperti rumah hunian Pak Karyono dan berfungi sebagai gereja.

2. Pembongkaran gereja HKBP Jumrah (Huria Kristen Batak Protestan) di Desa Jumrah tahun 2010. Kejadian ini bermula dari pembangunan Gereja oleh pemeluk Kristen di Desa Jumrah. Pemeluk Kristen mayoritas bermukim di Dusun Kampung Tanjung Selamat RT.07 RW 08 Desa Jumrah. Mereka terkonsentrasi di dusun ini dan telah mendirikan 5 Gereja, yaitu: (1) HKBP Jumrah; (2) HKBP; (3) GPdI; (4) Gereja Metodis Indonesia; dan (5). Gereja Katolik. Alasan pendirian Gereja HKBP Jumrah di pinggir Jalan Lintas, menurut pengurus Gereja untuk memudahkan akses jalan bagi jemaat yang berasal dari luar. Namun proses pendirian Gereja, tidak berkonsultasi dengan tokoh masyarakat muslim sekitarm, dan tidak minta izin pada aparat desa atau kecamatan.

   Pembangunan Gereja yang baru separoh jadi tersebut akhirnya diprotes warga muslim dan aparat desa. Sehingga kasus tersebut diambil alih penanganannya oleh Camat, Pemkab Rokan Hilir, MUI, dan DPRD Kabupaten. Kasus pembatalan pembangunan Gereja ini tidak sampai menyulut ketegangan antara kedua belah pihak sebagaimana terjadi di Desa Mukti Jaya, karena justru Pihak pemeluk Kristen meminta perlindungan kepada aparat Desa, Kecamatan dan Kepolisian.

1. Kasus Perluasan bangunan Gereja Bethel di Desa Seremban Jaya mirip pada kasus kedua (di Desa Jumrah) terjadi tahun 2011. Aktivitas pelebaran bangunan rumah hunian menjadi gereja permanen mendapat protes dari mayoritas Muslim di Desa Seremban Jaya. Akhirnya pemeluk Kristen dengan segera mengurungkan niat pembangunan gereja tersebut.

   Kelemahan dari pendirian gereja pada beberapa kasus di atas sebenarnya diawali karena tidak merujuk kepada PBM Menag dan Mendagri tahun 2006. Pihak pengurus gereja tidak berkonsultasi pada aparat pemerintah Desa, serta masih sedikitnya jumlah pemeluk Kristen di situ.

Kedua, Problem Penyiaran Aagama

Menurut informan muslim, simbol-simbol agama yang ditonjolkan oleh salah satu kelompok agama (Kristen) adalah dengan mendirikan gereja-gereja di beberapa tempat padahal jumlah penduduknya sangat terbatas. Hal menunjukkan adanya upaya penyebaran agama secara terselubung kepada pemeluk yang telah beragama, dan bukan disebabkan karena perbedaan *aliran, ritus,* dan *liturgi* dengan gereja yang sudah berdiri sebelumnya. Bagi informan Kristen persoalan pendirian gereja ingin menunjukkan identitas diri mereka sebagai penganut paham aliran yang berbeda dengan Kristen lainnya. Sudah tentu dalam acara kebaktian dalam hal-hal tertentu berbeda. Sementara pandangan sebagian pemeluk Islam, mereka merasa khawatir keberadaan gereja-gereja yang berdekatan dalam jumlah yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, sepertinya ada indikasi penyebebaran agama kepada pemeluk lain secara terselubung. Hal ini dimaknai bahwa simbol-simbol berkembangnya salib, al-kitab, kebaktian, *partahiangan*, misa natal, dan lain dianggap sebagian pemeluk Islam sebagai misi penyebaran agama. Begitu pula sebaliknya bagi sebagian pemeluk kristen penolakan pendirian gereja dan diberikan kemudahan mendirikan tempat ibadah masjid dan mushalla, hal itu sama artinya menurut mereka menghambat kebebasan beragama.

Cara pandang masing-masing pemeluk agama ditentukan oleh pemaknaan mereka terhadap simbol-simbol agama, dan perilaku masyarakat kedua belah pihak, Islam maupun Kristen. Penafsiran seorang muslim atau kristen atau sebaliknya tentang simbol agama seperti salib, al-kitab, gereja, masjid, al-Qur'an, dan lainya sehingga muncul istilah kristenisasi ataupun islamisasi makin menyulitkan relasi antarumat beragama di suatu wilayah, termasuk di Kecamatan Rimba Melintang.

Ketiga, Problem sosial-ekonomi

1. Terjadi penertiban beberapa kali yang dilakukan aparat Desa, tokoh masyarakat dan agama di Desa Seremban Jaya dan desa Jumrah tahun 2009-2013. Pendirian warung-warung *tuak* di wilayah dekat pemukiman penduduk Kristen. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tempat-tempat tersebut justru dijadikan tempat berkumpulnya kalangan pemuda-pemuda, baik Muslim maupun Kristen. Peristiwa penertiban dan pelarangan penjualan *tuak* terjadi ketika

kedai tersebut tetap buka siang malam saat bulan ramadan. Ketika bulan ramadan tiba aparat desa mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan buka kedai *tuak* di siang hari dan untuk malam hari tidak boleh lewat jam 12 malam.

Penertiban dan keluarnya surat edaran dari Aparat Desa, Camat maupun Polsek Kecamatan dipatuhi hanya beberapa bulan saja. Setelah waktu berlalu, warung *tuak* itu beroperasi lagi di beberapa tempat desa-desa yang umumnya banyak pemeluk Kristen, dengan tak ada batas waktu buka tutupnya siang- malam. Terakhir penertiban itu dilakukan ketika bulan ramadan tahun 2013 oleh aparat berwenang.

2. Kasus pembakaran tempat maksiat (tempat prostitusi) di Desa Pematang Botam Kecamatan Rimba Melintang tahun 2011. Tepatnya kejadian tersebut di wilayah yang terdapat areal pengeboran Minyak oleh PT Cevron Pasivik Indonesia (CPI) atau lebih dikenal *areal tangki*. Di sekitar areal tangki inilah dibangun pondok-pondok semi permanen yang awalnya sebagai tempat berdagang sekaligus menjual minum-minuman keras (tuak), lambat-laun areal tangki tersebut jadi tempat transaksi prostitusi. Sementara PSK (pekerja seks komersial) didatangkan dari luar daerah oleh oknum-oknum masyarakat pendatang. Aktivitas maksiat tersebut lambat laut tercium oleh masyarakat muslim setelah mendapatkan laporan dari beberapa masyarakat. Keresahan masyarakat makin memuncak karena ada kekhawatiran bisa menjalar dekat pemukiman penduduk. Masyarakat muslim spontanitas bergerak melakukan pembongkaran dan pembakaran pondok-pondok semi-permanen tempat prostitusi dan minuman tuak tersebut.

   Setelah kejadian pembakaran tersebut muncul ketegangan di wilayah areal tangki, namun aparat kepolisian segera mensterilkan wilayah itu agar tidak terjadi saling serang antar kedua belah pihak. Persoalan tersebut mereda mengingat jarak pondok-pondok maksiat itu jauh dengan pemukiman penduduk. Di areal tangki umumnya bermukim penduduk pendatang, di samping hanya didatangi oleh sebagian pekerja yang menjaga areal tangki dan fasilitas pengeboran minyak CPI.

3. Problem perebutan lahan juga menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat di beberapa desa Kecamatan Rimba Melintang tahun 2012-2013. Masalah perebutan lahan terjadi antara masyarakat tempatan di Desa Teluk Pulau Hilir, Desa Teluk Pulau Hulu, dan Desa Pematang Sikek berhadapan dengan Perusahaan pengembangan HTI (Hutan Tanaman Industri) yaitu PT Gunung Mas Raya dan PT RUJ.

Masyarakat di tiga desa mengklaim wilayah itu termasuk garapannya yang telah lama mereka miliki, sebagiannya telah ditanami Sawit, dan tanaman lainnya. Sementara dari pihak perusahaan PT Gunung Mas Raya dan PT RUJ mengklaim telah mengantongi izin, kemudian pihak perusahaan menanami tanaman akasia sebagai Hutan Tanaman industri (HTI) untuk memasok kebutuhan Indutri yang ada. Peneliti tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut karena kasusnya masih simpang siur, siapa sebenarnya yang berhak menguasa lahan tersebut, di samping pihak aparat Desa dan Kecamatan belum mau menjelaskan masalah ini lebih lanjut, sementara pihak perusahaan, siapa yang berhak untuk menjawab persoalan itu tidak jelas.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pemetaan problem relasi antarumat beragama Islam dan Kristen di Kecamatan Rimba Melintang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: *Pertama,* Problem penertiban dan pembongkaran gereja yang pernah terjadi di tiga Desa. *Kedua*, adalah Problem penyebaran agama. *Ketiga*, Problem sosial-ekonomi**.**

Penanganan masalah relasi antarumat beragama di atas belum dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Penanganan yang dilakukan masih bersifat *kuratif*, artinya persoalan itu sudah berkembang sedemikian rupa di tengah masyarakat, muncul keresahan di tengah masyarakat, hingga akhirnya masyarakat menghakimi dengan cara pembongkaran gereja, penertiban gereja, dan pembakaran tempat maksiat (prostitusi). Setelah terjadi kerusuhan dan situasi yang tidak kondusif baru turun pihak aparat pemerintah, kepolisian, DPRD dan MUI.

Berbagai problem di atas, belum tampak upaya-upaya bersifat *preventif*, atau pencegahan dari aparat Desa atau Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dan Majlis Ulama Indonesia (MUI) dengan terus mensosialisasikan kepada tokoh agama, masyarakat

dan institusi agama seperti masjid dan gereja, tentang Peraturan PBM antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006. Masyarakat perlu diberi penyuluhan hukum oleh aparat terkait agar jangan main hakim sendiri seperti pembongkaran, penertiban gereja dan kedai-kedai *tuak*; kemudian pembakaran tempat-tempat maksiat (prostitusi) sebelum berkoordinasi dengan pihak berwenang.

Catatan: (Endnotes)

1 Abd. Ghofur, M.Ag. adalah Dosen pada Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.

Daftar Referensi

Chaidar Alwasilah. (2002). *Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Dedi Mulyana. (2000). *Komunikasi Antar Budaya: Panduan Berkomunkiasi dengan Orang yang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

-------. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Gerungan. (2004). *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Tama.

Haidhor Ali Ahmad. (2012). *Hubungan Umat Beragama, Studi Kasus Pentutupan/Perselisihan Rumah Ibadah*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

Horton, Paul. (1990). *Sociology*. New York: Hill Book Company.

Koentjaraningrat. (1990). *Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.

-------. (1992). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

Lexy J. Moelong. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Lucas Partanda Koestoro, dkk. (2011). *Penelusuran Arkeologi dan Sejarah Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau*. Medan: Balai Arkeologi.

Michel, Thornes. (1997). *Islam And Cristhian-Muslim Relation*. Vol. 8 No. 1, 1997.

Miles, Mathew B. & A. Micahel Hubermen. (1992). *Analisis data Kualitatif*, terjemahan. Jakarta: UI Press.

Samover dan Porter. (1981). *Understanding Intercultural Communication*. California: Wadsworth Publishing.

Sastraprateja. (1992). *Manusia Multi Dimensi: Sebuah Renungan Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1992.

Smith, Donald E. (1995). *Agama dan Modernisasi Politik*, terjemahan. Jakarta: Rajawali Press.

Stokhof dan Jamal. (2003). *Konflik Komunal di Indonesia Saat ini*. Jakarta: INIS University Leiden dan PBB UIN Syarif Hidayatullah.

Tan, Mely G. (1981). *Golongan Etnik Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Wach, Joachim. (1990). *Ilmu Perbandingan Agama*. Jakarta: Rajawali Press.

WWW. *riau terkini.com* "DPR Sahkan Ibukota Rohil Pindah ke Bagansiapiapi", diakses pada 24 Agustus 2013.

WWW. *Portal Nasional.com* "DPR Sepakat Sahkan RUU Pembentukan 12 Daerah Otonom Baru", *Portal Nasional RI*, diakses pada 22 Agustus 2013.